

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki daerah atau wilayah yang sangat luas dan itu terdiri dari Pulau-pulau (kecil maupun besar) sehingga Negara Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Banyaknya kepulauan-kepulauan dapat memberikan variasi budaya, adat istiadat, bahasa pada setiap daerah atau kepulauan yang ada di Negara Indonesia. Bahasa Nasional yang dipakai. Begitupun dengan banyaknya budaya kita, kemudian dengan banyaknya sumber daya alam kita yang ada di Indonesia itu dapat dimanfaatkan sebagai pusat atau sumber energi. Sumber energi yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pasar global (untuk kebutuhan luar negeri maupun kebutuhan lokal dalam negeri). Kepulauan-kepulauan Indonesia memiliki banyak sumber daya alam (SDA) yang meliputi gas, minyak bumi, dan lain-lain.

Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau lebih dikenal sebagai bencana Lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas yang terjadi dalam beberapa tahun ini tepatnya 9 Tahun dari sekarang (2014-2015) menyebabkan banyak kerusakan yang terjadi Baik dalam segi Ekonomi dan segi Sosial. Kemudian lumpur tersebut sampai kekawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di banyak tempat di sekitarnya, serta

membuat terhambatnya aktivitas jalan dan perekonomian di Jawa Timur. Lumpur Lapindo merupakan Bencana atau lebih tepatnya kesalahan yang dilakukan oleh operator yang menangani pengeboran gas di PT Lapindo Brantas yang ada di Sidoarjo. Kemudian timbullah kebocoran gas yang terjadi di daerah itu. dan setelah kejadian itu banyak hal yang terjadi di daerah tersebut. seperti Lumpur tersebut menggenangi rumah yang ada disekitarnya.

Dampak lumpur Lapindo ini sudah cukup banyak dirasakan oleh masyarakat di daerah sekitar tempat dampak Lumpur Lapindo Brantas. Hal ini terbukti sebagian wilayah yang dekat dengan semburan lumpur Lapindo seperti: rumah, pabrik, sawah, tempat ibadah, sekolah dan lainnya yang tergolong bagian menjadi lautan lumpur Lapindo. Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur: genangan hingga setinggi (6 meter pada 2007) Sekarang sudah mencapai 12 meter (2013).

Pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; area pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha, (Pada Tahun 2006-2007). Selain kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah hampir 9 tahun dari sekarang (2014-2015) tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan kehidupan yang dialami, krisis sosial dan ekonomi yang sangat sulit dihadapi oleh para korban. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Sosial

Kabupaten Sidoarjo melaporkan total warga yang dievakuasi pada munculnya lumpur sekitar 8.567 jiwa atau 2.098 Kepala keluarga, rumah yang rusak lebih dari 2.000 unit, lebih dari 500 ha areal perkebunan rusak dan sekitar 40 pabrik yang tenggelam terpaksa menghentikan produksinya dan merumahkan sekitar 2.156 orang. Di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai penghasil minyak dan gas bumi, dimana dari 49 sumur yang terdapat di Jawa Timur (Blok Brantas), 43 sumur berada di kabupaten Sidoarjo, 4 sumur di Kabupaten Mojokerto, dan 2 sumur di Kabupaten Pasuruan. Potensi minyak dan gas tersebut menyebabkan banyak perusahaan, baik swasta maupun nasional dan juga perusahaan luar negeri, yang sangat berminat dan ingin mendirikan perusahaan gas dan minyak bumi (migas) di kawasan tersebut.

PT Lapindo Brantas adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan Pan Asia Enterprise (15,76 persen). Dikarenakan memiliki nilai saham terbesar, maka Lapindo Brantas bertindak sebagai operator. PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan (Grup Bakrie). Grup Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 31,18% . "Chief Executive Officer" (CEO) Lapindo Brantas Inc. adalah (Nirwan Bakrie) yang merupakan adik kandung dari pengusaha dan

(Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia) pada Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Aburizal Bakrie.

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Gempol, Pasuruan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan. Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pemboran, walaupun pendapat tersebut ketika dipraktikan tidak dapat menghentikan luapan lumpur tersebut. Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Jalan Tol Surabaya-Gempol, Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi, Indonesia

Setelah musibah tersebut terjadi, para korban Lumpur Sidoarjo bertempat tinggal di pengungsian. Setelah bertahan hampir 4 tahun, masyarakat yang masih

bertahan dilokasi pengungsian di Pasar baru Porong berada dalam posisi yang sangat terjepit,karena sejak April 2009, ijin menempati lokasi Pasar Baru Porong telah berakhir sehingga mereka terpaksa harus pindah dari tempat tersebut. Dalam upaya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah,setiap warga memperoleh 1 kapling dengan luas tanah 8 x 15 Meter dengan harga Rp. 17 juta. Ketentuan ini tentunya dirumuskan supaya untuk menghindari masuknya warga baru yang menempati daerah tersebut. Dapat diketahui bahwa penanganan korban Lumpur Lapindo masih kurang baik dan dari segi sosial tidak ada penanganan dari pemerintah melalui BPLS baik dari segi penggantian mata pencaharian dan bantuan terhadap korban Lumpur Sidoarjo, sedangkan masalah ganti rugi hanya 20% diawal dan 80% dicicil itupun tidak sesuai dengan perjanjian dan sering terjadi keterlambatan pembayaran.

Sampai saat ini Lapindo masih terkesan tidak mau atau tidak peduli membayar ganti rugi kerusakan yang diakibatkan oleh ulahnya,apalagi harus mendanai banyak fasilitas umum yang jumlahnya terbilang cukup besar,bahwa dapat dipastikan akan semakin alot usaha untuk mendesak lapindo mendanai relokasi tersebut. Kemudian pemerintah juga ikut dalam mengganti biaya rugi kerusakan yang diakibatkan oleh pihak lapindo tersebut. Setelah itu presiden membuat keputusan mengenai ganti rugi korban lumpur lapindo dengan cash and carry,dan keputusan tersebut berlaku bagi desa renokenongo dan kedungbendo,sebagian dari desa ketapang dan gempolsari juga mendapat ganti rugi termasuk perumtas yang paling gigih berjuang memperoleh haknya.pembayaran dilakukan berdasarkan daftar tunggu,sehingga pembayaran

akan diberikan pada korban secara menyeluruh.tapi entah sampai kapan mereka harus menunggu pembayaran tersebut,hingga sampai sekarang bahkan setelah hampir 8 tahun masih banyak warga yang menunggu biaya ganti rugi dari pihak lapindo.

Pemerintah berjanji akan menangani dampak semburan panas itu hingga 2015. Tapi siapa sangka, biaya penanganan lumpur Lapindo itu menelan dana APBN sebesar Rp8,6 triliun yang diambil dari pajak rakyat. Hingga Mei 2012, sebanyak 4.229 berkas korban lumpur Lapindo belum dilunasi. Nilai ganti rugi itu mencapai Rp920 miliar. Sementara itu, semburan lumpur panas belum dapat dihentikan. Pemerintah pun harus mengeluarkan anggaran untuk menangani dampak semburan tersebut. Sejak 2006, pemerintah menanggung biaya penghentian lumpur dan penanganan korban. Hingga 2010, pemerintah mengucurkan dana Rp2,8 triliun. Pada APBN Perubahan 2012, pemerintah menyetujui anggaran Rp1,2 triliun untuk menangani lumpur.

Dalam hal ini Desa Ketapang Tanggulangin merupakan salah satu dari sekian banyak desa yang tenggelam oleh lumpur lapindo. Walaupun hanya sebagian atau bisa dibilang hampir setengahnya desa tersebut tenggelam dalam lumpur,banyak warga dari desa ketapang yang rumahnya belum terkena lumpur atau ikut tenggelam sudah banyak pindah dari desa tersebut karena mereka juga tidak ingin ambil resiko terkena dampaknya. Saat ini penduduk yang masih tinggal didesa ketapang tanggulangin berjumlah sangat sedikit,karena banyak warganya yang pindah tempat dari tersebut. Alasan mereka pindah karena mereka diberikan tawaran kompensasi oleh pihak pemerintah yaitu Humas Badan

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan banyak yang menerima tawaran kompensasi tersebut. Tawaran yang diberikan oleh pihak (BPLS) yaitu membeli tanah dan bangunan yang dimiliki oleh warga dengan melalui dua sistem yaitu pembayaran pertama (awal) sebesar 20% dan diikuti dengan pembayaran kedua (terakhir) sebesar 80%. Banyak dari para penduduk desa ketapang menyetujui perjanjian tersebut, tetapi sekarang tersisa beberapa penduduk di kawasan desa tersebut yang masih berharap untuk mendapatkan dana kompensasi yang diberikan oleh pihak BPLS, sehingga mereka bisa pindah tempat tinggal ke tempat yang aman dan jauh dari semburan lumpur yang ada di daerah itu.

Bencana tersebut banyak mendatangkan manfaat negatif bagi mereka yang bermukim di dalam kawasan tersebut, hal yang paling sangat dirasakan oleh penduduk di desa ketapang tanggulangin adalah dampak sosial. Meskipun banyak penduduk dari desa ketapang tanggulangin yang sudah mendapatkan dana kompensasi 100% masih banyak dari mereka yang masih ada di daerah tersebut, alasannya seperti warga terpaksa melakukan perpindahan tempat yang jauh dari tempat bekerja mereka atau berpindah jauh ke tempat sanak saudara mereka. Hal ini dapat mengakibatkan komunikasi dan sosialisasi mereka terganggu karena mereka harus menyesuaikan adat dan tradisi yang ada di tempat mereka yang baru yang cukup memakan waktu yang agak lama, belum lagi mereka harus mencari pekerjaan yang baru bagi mereka yang diberhentikan dari pabrik.

Selain itu, mereka juga melakukan demonstrasi dan unjuk rasa, hingga melakukan perjalanan ke Istana Merdeka untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada presiden. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut, menegaskan bahwa

kehidupan warga lumpur lapindo tidaklah nyaman. Ketidakpastian dalam penyelesaian dan penanganan bencana khususnya menyangkut masa depan korban, akan mampu membawa dampak psikologis seperti frustrasi dan dapat membawa kepada tahap yang semakin buruk.

Masalah-masalah yang terjadi dalam warga korban Lumpur Lapindo semakin buruk dan rumit. karena banyak faktor-faktor yang terjadi dalam sistem masyarakat sehingga komunitas mereka tidak bisa dijaga dengan seutuhnya, seperti halnya kondisi ekonomi mereka yang cukup memprihatinkan, banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh norma agama, mereka cenderung berpikir secara pendek dan banyak melakukan jalan pintas yang bisa dikatakan hal yang negatif dalam melakukannya. Kondisi mereka yang semakin memburuk atau bisa dibilang tak kunjung menunjukkan penyelesaian masalah yang terjadi, kondisi tersebut saat ini membutuhkan banyak pemikiran 'jalan keluar' baik secara social atau pribadi, namun saat ini satu-satunya jalan yang mereka harapkan adalah tanggung jawab Lapindo bersama Pemerintah.

Melihat dari banyaknya berbagai permasalahan yang ada, pemerintah dan PT Minarak Lapindo seharusnya memaksimalkan upaya memberi kompensasi kepada warga yang menjadi korban, sehingga apabila dana kompensasi tersebut masih ditunda-tunda. Maka hal tersebut akan mengakibatkan meledaknya kemiskinan yang terjadi pada korban lumpur lapindo karena mereka kehilangan pekerjaan sehingga terpaksa harus minta-minta di jalan dan penghasilan yang didapatkan pula tidak menentu.

Kejadian tersebut sudah sangat jelas semakin terpuruk, semua persoalan ini tentu saja menjadi beban yang sangat berat. Apalagi kekhawatiran mereka tentang bagaimana nasib pendidikan anak-anak mereka yang tidak dapat terabaikan, pemerintah tidak menyediakan upaya khusus bagi pendidikan mereka. Sementara biaya sekolah tetap tinggi sedang beban ekonomi keluarganya terus meningkat dan ratusan anak terancam putus sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi bertahan hidup para korban yang berada di desa Ketapang Kec. Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian Secara Umum

Untuk mengetahui bagaimana cara adaptasi para korban lapindo yang berada di desa ketapang Kec. Tanggulangin Kabupaten Porong setelah terkena bencana Lumpur Lapindo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun laporan ini dibuat bertujuan untuk

1. Mengetahui yang terjadi di pada penduduk desa Ketapang Tanggulangin dari segi Adaptasi
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum dan sesudah pasca kejadian bencana terjadi.

1.5.1 KERANGKA TEORI

1.5.1 LANDASAN TEORITIS

1.5.1.1 Penelitian Terdahulu

Peristiwa Lumpur Lapindo Sidoarjo sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan juga oleh Negara-negara luar diseluruh dunia,terlebih lagi oleh para mahasiswa. Sehingga banyak para Ilmuan,Tokoh Masyarakat,dan Mahasiswa untuk meneliti peristiwa tersebut, baik digunakan sebagai karya tulis (ilmiah) atau sebagai skripsi bagi mahasiswa semester akhir. Karena sangat banyak sekali hal yang bisa dikaji seperti dalam segi sebelum dan sesudah bencana terjadi baik dari segi masyarakat ataupun segi sosial yang terjadi.

Penelitian pertama dari senior saya sebelumnya yaitu mahasiswa Sosiologi yang bernama Febry Puji Lestari (2010) yang menjelaskan tentang “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Bagi Masyarakat Korban Lumpur Sidoarjo”. Pendidikan memang sangat penting bagi mereka terutama korban Lumpur Lapindo yang putus sekolah karena kejadian bencana tersebut. Bila merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945,dalam pasal 31 ayat 1 bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5,juga dijelaskan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu ,warga negara yang memiliki kelainan fisik,emosional,mental,intelektual,dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus,warga negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus,warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan

husus serta setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya ”.

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pada kondisi bencana karena mengingat pentingnya pendidikan anak khususnya pada masa pertumbuhan usia sekolah dasar. Apalagi pada rentang usia tersebut adalah awal pembentukan karakter dan kecerdasan anak terbentuk serta diberikan hal-hal yang terbaik juga perhatian yang optimal, sehingga anak tumbuh dengan baik.

Penelitian dari senior saya yang kedua yaitu mahasiswa Sosiologi yang bernama Anita Lidia Fatma (2013) yang menjelaskan tentang “Perubahan Sosial Korban Bencana Lumpur Sidoarjo di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo”. Disini yang dijelaskan dari perubahan sosial apa yang terjadi bagi masyarakat di kawasan kelurahan jatirejo, seperti bagaimana kehidupan mereka setelah bencana yang terjadi kemudian bagaimana mereka mengatasi perubahan drastis yang terjadi setelah bencana tersebut kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap lingkungan mereka yang baru yang dimana banyak terdapat adat dan sistem baru yang belum mereka ketahui dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Setelah itu penelitian yang lain dari senior saya, walaupun tidak membahas tentang Lumpur Lapindo tetapi setidaknya dia membahas tema yang hampir sama dengan saya yaitu Mahasiswa Sosiologi yang bernama R.Septian Bayu Hadinata (2010) yang berjudul tentang “Strategi Bertahan Hidup Bagi Masyarakat Nelayan Miskin (Studi Kasus di Kampung Nelayan, desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang

bagaimana gambaran tentang kehidupan seorang nelayan miskin yang hidupnya serba kekurangan. Dan dalam permasalahannya yaitu dijelaskan tentang bagaimana masyarakat pesisir seperti para nelayan memenuhi kehidupan mereka. Melaut atau mencari ikan merupakan sumber utama dari sebagian besar masyarakat pesisir Kecamatan Camplong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pekerjaan ini mereka lakukan karena selama ini mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut saat mereka masih kecil dengan sering membantu pekerjaan ayahnya. Jadi ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka merasa sudah terbiasa dan mampu melakukan pekerjaan tersebut sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mencari pekerjaan lain yang belum tentu mereka mampu menjalaninya. Mereka tidak dapat keluar dari pengaruh kebiasaan ini yang telah tertanam sejak mereka masih kecil, ini karena profesi nelayan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga memaksa mereka untuk menjalani profesi sebagai nelayan yang sangat melelahkan.

Kenyataan seperti ini tidak dapat dihindari oleh masyarakat di daerah tersebut karena faktor kemiskinan yang mereka alami, dan memang pekerjaan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dinikmati oleh masyarakat sekitar, sejak mereka masih kecil hingga terbawa sampai mereka beranjak dewasa dan setelah memiliki anak, kebiasaan tersebut akan diturunkan lagi kepada generasi selanjutnya.

1.5.1.2 Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons)

Fungsionalisme struktural adalah salah satu teori di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang

saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidak seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisme yang didapat dalam biologi . Dalam pemikiran dasar teori ini ialah, bahwa semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Jadi apa yang dikemukakan teori ini mengatakan, bahwa segala sesuatu didalam masyarakat ada fungsinya, termasuk hal – hal seperti kemiskinan, peperangan, atau kematian. Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya sistem sosial masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *Adaption*, *Goal*, *Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni

1. Adaptasi (*adaptation*): supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu.

3. Integrasi (*integration*): masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal.
4. *Latency* atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membarui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.

Bagi parsons perkembangan masyarakat manusia bisa dilihat dengan cara yang sama. Masyarakat-masyarakat sederhana bisa dilihat sebagai sel tunggal yang semula terbagi menjadi empat subsistem dan sistem umum mengenai tindakan dan pada gilirannya masing-masing subsistem itu terbagi lagi. Sebuah yang lebih spesifik dapat diambil dari Parsons sendiri : transisi dari sistem masyarakat desa yang berdasarkan pertanian kepada masyarakat industri. Di sini termasuk juga pemisahan ekonomi dari sistem sosialisasi. Sedangkan dalam masyarakat pra-industri, unit keluarga adalah juga unit utama untuk produksi. Keluarga menangani dan mengerjakan tanah secara bersama-sama meskipun dengan kerja tertutup, industrialisasi memisahkan pekerjaan kedalam perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor. Sedangkan kehidupan keluarga hanya dibatasi dirumah. (CRAIB,ian 1994:71-72)

Dan berbicara mengenai fungsi keluarga itu tidaklah hanya menyangkut fungsi kerjasama ekonomi dan sosialisasi seperti dikemukakan Parsons. Proses differensiasi itu pada waktu yang sama memerlukan satuan-satuan baru dengan kekhususan fungsinya sendiri tetapi berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti bahwa differensiasi memerlukan integrasi kembali, yang dapat berhasil

lewat satu system normatif yang member tawaran hubungan-hubungan antar satuan itu tadi, seperti keluarga dan pabrik. (Garna,Judistira K. 1993 : 61-62)

Differensiasi memperlihatkan reformasi struktur sosial, pada awal proses akan tampak suatu sistem dalam keadaan seimbang yang terganggu, bukan hanya sebagian system saja,malahan terhadap keseluruhan satuan. Tekanan Parsons yang kuat adalah keteraturan sosial dan keseimbangan, karena itu kritik sering diarahkan padanya sebab ia gagal membahas konflik dan perubahan dianggap lebih baik. (Garna,Judistira K. 1993 : 62)

Diferensiasi ialah proses dari satuan atau subsistem yang memiliki tempat tertentu dalam masyarakat itu terbagi kedalam satuan-satuan berbeda dalam struktur dan fungsi pada sistem yang lebih luas. Satuan-satuan yang baru itu harus mampu melakukan kegiatan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan sistem daripada yang dilakukan oleh subsistem yang belum mengalami differensiasi, seperti fungsi keluarga sekarang dan pembagian kerja dalam masyarakat industri modern. (Garna,Judistira K. 1993 : 63)

Fungsional Sistem Bagi Masyarakat Ketapang

Dalam penjelasan yang dimaksud oleh talcott parsons yaitu menjelaskan bagaimana masyarakat bisa menjalankan sistemnya apabila semua faktor-faktor dalam sistem tersebut berfungsi dengan baik. Jadi maksudnya yaitu dalam sistem bertahan hidup yang dilakukan oleh masyarakat Desa ketapang Kec.Tanggulangin Kab.Sidoarjo,untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga. Mereka harus bisa menggunakan segala kemampuan yang dimiliki oleh keluarga tersebut,maksudnya semua anggota keluarga harus bisa mencari penghasilan

untuk kebutuhan hidup mereka, bukan hanya sang suami yang mencari kebutuhan pokok tetapi sang istri dan anak juga ikut membantu dalam memenuhi hal pokok mereka. Seperti misalnya dulu sebelum terjadi Bencana Lumpur Lapindo keadaan perekonomian di Desa Ketapang sangat baik, karena tempat tersebut waktu itu merupakan salah satu pusat industri dan pusat dari kesenian Tas dan Batik. Sehingga banyak yang dulunya warga dari desa Ketapang menjadi pengrajin dan pekerja di kawasan tersebut. Kemudian setelah terjadi bencana Lumpur Lapindo, kondisi sistem perekonomian dan industri di Desa Ketapang langsung anjlok dan dalam waktu beberapa bulan daerah Tanggulangin dan sekitarnya tenggelam oleh luapan Lumpur Lapindo yang tiada hentinya sampai sekarang.

Adaptasi (Adaptation)

Setelah kejadian bencana tersebut Desa Ketapang termasuk salah satu dari Peta Area Luar Terdampak karena desa tersebut belum tenggelam sepenuhnya dan berdekatan dengan tanggul dan Peta Area Terdampak (Bagi beberapa RT yang tenggelam oleh Lumpur Lapindo). Banyak dari warga tersebut ingin pindah ke tempat lain setelah mengadakan musyawarah yang dilakukan di Kelurahan Ketapang yaitu melakukan sistem pembayaran dengan tempo dua kali maksudnya pembayaran pertama dilakukan 20% dan sisanya 80% setelah itu, karena mereka tidak ingin rumahnya tenggelam tanpa ganti rugi. Sehingga mau tidak mau mereka harus pindah ke lingkungan yang lain dan menyesuaikan keadaan disana.

Dan beberapa dari mereka yang masih tinggal di lingkungan tersebut terpaksa mencari pekerjaan yang baru dan mengharapkan bantuan dari orang lain serta menunggu pembayaran dari pemerintah dan pihak yang bersangkutan

Pencapaian tujuan (Goal Attainment)

Dalam pencapaian tujuan ini yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat yang ada di Desa Ketapang Kec.Tanggulangun Kab.Sidoarjo mempertahankan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam hal ini mereka melakukan musyawarah dengan pegawai yang ada di kelurahan Ketapang untuk membahas bagaimana nasib mereka saat semburan Lumpur Lapindo mulai mendekati rumah mereka. Akhirnya banyak dari warga yang ada di desa ketapang itu setuju untuk menerima ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah melalui perantara kelurahan untuk memenuhi ganti rugi tersebut. Tetapi masih ada beberapa warga yang bertahan dikarenakan masih betah dan tidak mau menjual properti milik mereka ke pemerintah.

Integrasi (Integration)

Dalam penjelasan ini yaitu masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dengan kata lain satu komponen membutuhkan komponen yang lainnya untuk bertahan, masyarakat yang ada di Desa Ketapang yang sudah mendapat ganti rugi oleh pemerintah pindah ke tempat lain untuk membeli tanah yang baru disana. Kemudian mereka bergotong-royong saling rukun dalam proses pembuatan tanah pembangunan rumah dan hingga sampai menempati rumah. Karena itu masyarakat sekitar membutuhkan masyarakat korban lumpur lapindo untuk membeli dan menempati tanah mereka. Sedangkan korban Lumpur Lapindo membutuhkan jasa penyedia lahan kehidupan dan lingkungan sosial

mereka yang baru. Sehingga timbullah hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain.

(Latency) atau pemeliharaan pola-pola

Walaupun banyak dari warga di Desa ketapang yang sudah pindah ketempat lain,ada juga beberapa masyarakat yang masih betah atau menetap ditempat tersebut. Karena mereka sudah terbiasa tinggal disitu dan lahir ditempat itu,jadi mereka tidak ingin pindah ketempat lain. Karena pada saat musyawarah yang dilakukan oleh Kelurahan Ketapang,mereka tidak memaksa apabila masih ada warga yang tetap ingin tinggal ditempat tersebut. Karena apabila pindah ketempat lain mereka khawatir tidak bisa bersosialisasi ditempat tersebut. Karena itu pola-pola kegiatan yang mereka lakukan tidak berubah walaupun terjadi Bencana Lumpur Lapindo didaerah mereka.

1.5.2 LANDASAN KONSEPTUAL

1.5.2.1 Strategi Bertahan Hidup (Survival Strategy)

Dalam teori ini “Survval Strategy” akan dijelaskan hubungan antara teori dan keadaan yang berlangsung saat ini yaitu bagaimana para korban lumpur lapindo dapat bertahan hidup ditengah situasi kemiskinan yang mereka hadapi. Maka berikut ini teori bertahan hidup (Survival Strategy) dari berbagai opini. Survival berasal dari kata *survive* yang memiliki arti bertahan atau bertahan hidup. Survival adalah bagaimana makhluk mempertahankan hidup dialam,bebas dari berbagai hambatan sebelum mendapatkan bantuan.sedangkan pengertian yang lain survival adalah suatu kondisi dimana individu atau kelompok yang dalam kondisi normal (kehidupan dan lingkungan) kemudian tiba-tiba menghadapi kondisi yang

tidak memungkinkan sehingga harus bisa menghadapi kondisi tersebut. Orang yang melakukan *survival* dinamakan survivor. Survival yang biasa dilakukan yaitu di hutan atau alam bebas sehingga disebut Jungle Survival. Kondisi Survival terjadi karena adanya kondisi darurat yang disebabkan oleh alam, kecelakaan, gangguan satwa, atau kondisi lainnya. Secara umum aspek-aspek dalam kondisi survival dibagi menjadi tiga faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan yaitu pertama dari segi psikologis (mental) yang seperti panik, takut, cemas, sendirian (sepi), bingung, tertekan, bosan. Kemudian yang kedua yaitu segi fisiologis (kondisi tubuh) seperti lapar, lelah, haus, sakit, luka, dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah dari segi lingkungan yang merupakan panas, dingin, dan hujan. Ada tiga jenis strategi berdasarkan status sosial ekonomi rumah tangga menurut White yaitu

- 1) Strategi survival merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat minimum agar dapat kelangsungan hidup.
- 2) Strategi konsolidasi merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dicerminkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sosial. Strategi ini digunakan oleh keluarga kalangan menengah yang mempunyai pekerjaan yang tetap namun belum mampu untuk memupukan modal.
- 3) Strategi akumulasi merupakan strategi pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai kebutuhan pokok, sosial dan pemupukan modal. Hal ini dilakukan oleh keluarga tingkat atas yang mempunyai kekayaan yang cukup.

Ketiga strategi tersebut menurut White tidak selalu muncul dalam suatu masyarakat. Strategi yang muncul akan berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya karena strategi yang dilakukan sangat tergantung pada ekonomi rumah tangga.

Secara umum strategi bertahan hidup dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola segenap asset yang dimilikinya. Kelangsungan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kata kerja yang menerangkan suatu keadaan atau kondisi yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan yang merupakan suatu proses yang terjadi dan nantinya bermuara pada suatu eksistensi atau ketahanan suatu keadaan. (White,dalam Amanda,2013:24)

Kemudian untuk menjelaskan permasalahan yang lebih mendalam lagi,masyarakat yang menjadi korban lumpur lapindo yang berada didesa Ketapang Tanggulangin banyak mengalami dan menghadapi kehidupan yang serba sulit,mereka sangat memerlukan berbagai macam strategi supaya mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menentu didalam tengah-tengah kehidupan perkotaan. Terlebih lagi dalam kehidupan perekonomiannya,hal yang paling dasar yang mereka butuhkan adalah uang dan makanan. Dua hal tersebut adalah hal yang dibutuhkan supaya mereka bisa bertahan dan mereka harus bisa

mempersiapkan beberapa strategi survival agar dapat terus dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Karena ketidakpastian masa depan yang tidak bisa diprediksi / diramalkan maka cara untuk mendorong orang dalam mensiasati hidup dalam rangka mengatasi masalah melalui perjuangan hidup. Dalam mengatasi cara ini diperlukan perjuangan survival yang menempati pada tiga level,yaitu 1) Basic need (kebutuhan pokok) 2) strategi kelangsungan hidup, dan 3) melalui mekanisme sosial. Strategi apapun yang dikembangkan para orang miskin (korban lumpur lapindo) dikatakan akan mempunyai dampak yang cukup mempengaruhi kehidupan mereka,tetapi bukan hanya itu tapi juga terhadap pembangunan jangka panjang dan keterbelakangan masyarakat.

1.5.2.2 PT Minarak Lapindo

PT Minarak Lapindo atau lebih tepatnya Lapindo Brantas merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengeboran Gas dan Minyak, saham terbesar saat ini yaitu masih dimiliki oleh Keluarga Bakrie Brothers. Kemudian sebagian saham yang lain adalah milik Medco dan Santos.

Awal mula pengeboran

Pada bulan februari 2006 PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran atau Drilling dengan menunjuk rekanan kerja atau partner yaitu perusahaan PT Tiga Musim Mas Jaya (TMMJ), untuk melakukan pengeboran uji coba yang pertama didaerah tersebut (Porong Tanggulangin).Uji coba pertama tersebut dinamakan “Sumur Dalam” di area “Banjar Panji” (BJP#1) dengan target drilling pada

kedalaman 12.000 ft atau 4.000m diwilayah kecamatan Porong atau lebih tepatnya didesa Renokenongo.

Terjadinya Semburan Lumpur Lapindo

Pada tanggal 29 mei 2006 masyarakat porong dikejutkan dengan adanya semburan lumpur yang diikuti dengan bau gas yang seperti bau telur busuk. Warga memperkirakan itu semua berasal dari tempat pengeboran gas dan minyak yang dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Brantas. PT Minarak Lapindo Brantas melakukan kesalahan saat melakukan pengeboran yang berdampak pada kebocoran gas. Banyak area pengeboran milik Lapindo yang tersebar diwilayah Sidoarjo,tetapi sumur tesebut memiliki kedalaman 8.000 ft atau 3.000m. PT. Minarak Lapindo melanggar peraturan pengeboran/drilling dunia yang “terdapat larangan untuk mengebor Gas dan Minyak dikawasan area pemukiman padat penduduk”. Usaha untuk drilling didesa Renokenongo ini sebenarnya sudah ditentang oleh konsultan ahli Australia,karena ujicoba “Sumur Dalam” dirasa kurang aman.

Karena dilakukan diarea pemukiman padat penduduk dan banyak juga pabrik-pabrik yang berskala besar, tetapi lapindo berambisi untuk tetap mengebor diarea tersebut tanpa memperhitungkan dampak selanjutnya.Apabila gagal dalam ujicoba “sumur dalam” ini,maka biarpun apa yang dikerjakan oleh PT Minarak Lapindo melanggar peraturan pengeboran dunia. Dengan ambisi yang besar Lapindo menghalalkan segala cara untuk memperlancar usaha Drilling tersebut.

1.5.2.3 Konstruksi Bencana Lumpur Terjadi

PT Minarak Lapindo mengelabui masyarakat setempat dengan dalih mendirikan Usaha Pabrik Pakan Ternak atau Pembesaran Ternak Sapi, bukan untuk melakukan usaha pengeboran gas dan minyak yang ada di daerah tersebut (Renokenongo) biar warga mau melepas aset tanah miliknya dengan harga yang lebih murah. Dalam aktivitas pengeboran “Sumur Dalam” ini Lapindo maupun PT Tiga Musim Mas Jaya saat melakukan pengeboran tanpa mempergunakan sarana pengaman atau (chasing). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir biaya operasi pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo, karena harga sewa chasing yaitu sebesar Rp 1,5 M juga sarana yang dimiliki oleh partner Lapindo yaitu PT Tiga Musim Mas Jaya hanya berkapasitas kecil. Apa yang dilakukan oleh Lapindo dan PT Tiga Musim Mas Jaya adalah suatu kecerobohan yang fatal karena saat melakukan pengeboran pada kedalaman 8.000ft atau 3.000m terjadi kebocoran yaitu munculnya semburan atau buble yang mengeluarkan material lumpur panas dan gas.

Melihat kejadian ini Lapindo dan PT Tiga Musim Mas Jaya terkesan lambat dalam menangani kebocoran sumur tersebut (Lapindo dan PT TMMJ) berpendapat bahwa kejadian semburan lumpur panas (Hot Mud Buble) tersebut diperkirakan ada atau terdapat pundi-pundi emas dan sumber gas/minyak. Akibat lambat dalam menangani kasus tersebut sehingga mereka (Lapindo dan PT TMMJ) sudah tidak mampu menutup kebocoran. Kemudian peristiwa tersebut mengguncang dunia usaha drilling minyak dan gas baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, dengan munculnya Buble/semburan Lumpur dan Gas diluar

area pengeboran Lapindo. Pada jarak 200m tepatnya di Desa Siring dengan debit lumpur panas yang dimuntahkan kurang lebih sekitar 5.000m kubik/perhari. Kian hari lumpur panas yang dikeluarkan ditempat tersebut makin meningkat.

1.5.2.4 BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Lembaga ini melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, yang kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya BPLS.

Dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan”. Ayat (2) “Badan Penanggulangan bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.” Dan ayat (3) “Badan penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.” dan ini gambaran struktur dari BPLS (www.bpls.go.id)



(www.bpls.go.id)

Antara Tugas Penanggulangan Lumpur dan Aspirasi Warga

Warga yang tergabung dalam kelompok 45 RT dan 3 Desa mendesak pemerintah agar mengakomodir tuntutan mereka di dalam revisi Perpres 14/2007 yang ketiga tahun 2011 yang hingga saat ini belum terbit. Akibatnya warga seringkali melakukan unjuk rasa, sehingga mengganggu aktivitas penanggulangan lumpur Sidoarjo. Beberapa kali unjuk rasa yang dilakukan warga kerap mengakibatkan terganggunya sejumlah aktivitas penanggulangan lumpur, diantaranya kegiatan penimbunan/ peninggian tanggul penahan lumpur, serta pengaliran lumpur/ sedimen ke Kali Porong. Warga 45 RT menuntut agar wilayahnya dimasukkan dalam Peta Area Terdampak (PAT) dan diperlakukan sama dengan wilayah 3 desa. Sedangkan warga 3 desa menuntut percepatan sisa pembayaran. Seperti halnya tuntutan pelunasan jual beli tanah dan bangunan warga tiga desa, yang

didasarkan pada Perpres No. 40 tahun 2009. Dalam kondisi seperti ini BPLS berada pada posisi dilematis. Jika dibayar maka secara hukum BPLS melanggar aturan Perpres Nomor 40 Tahun 2009 dan UU No. 10 tahun 2010 tentang APBN 2011, bahwa pembayaran harus mengikuti progres LBI. Sementara itu payung hukum terkait tuntutan warga belum terbit, sehingga menghadapi situasi yang dilematis. Di satu sisi BPLS mengemban tugas memberi perlindungan terhadap warga dari bencana geologi, di sisi lain justru sering mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan solusi pemecahan masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Menyadari kondisi semacam ini, BPLS telah berusaha melakukan berbagai kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi baik mengenai semburan lumpur, serta aktivitas yang akan dilakukan, utamanya terkait dengan penanganan masalah sosial kemasyarakatan. Langkah - langkah ini relatif memerlukan waktu, oleh karena itu, seringkali muncul anggapan di lingkungan warga masyarakat, bahwa BPLS lamban, atau sengaja melakukan pembiaran masalah.(Surya,3 Oktober 2011)

Anggapan semacam itu tentu tidak benar. Sebab sikap pembiaran, justru akan sangat berdampak negatif terhadap kelancaran tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab BPLS. Logikanya, kalau masalah jual beli dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka BPLS akan dapat lebih berkonsentrasi pada tugas-tugas lainnya, seperti pembangunan tanggul penahan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, relokasi infrastruktur dan berbagai penanganan fasilitas dan utilitas lainnya. Langkah-langkah tersebut tentu telah sesuai dengan visi BPLS, yaitu

mewujudkan pulihnya sendi - sendi kehidupan yang dinamis dari dampak fenomena gunung lumpur di Sidoarjo pada tahun 2014. (Surya ,3 Oktober 2011).

1.5.2.5 Keadaan Desa Ketapang setelah terkena dampak Lumpur Lapindo

Keadaan dan kondisi desa ketapang sudah cukup memprihatinkan, dikarenakan tempat tersebut sudah sangat sepi penduduknya dan banyak dari mereka yang sudah pindah ketempat lain atau bisa dibilang mengungsi,karena mereka takut kalau tanggul yang berdekatan dengan desa mereka,itu sewaktu-waktu bisa jebol dikarenakan banyaknya luapan semburan lumpur lapindo yang sudah tidak bisa dihentikan lagi. Dan juga banyak dari masyarakat yang sudah mendapat ganti rugi dari pemerintah,hal ini terjadi karena dulu saat ada keputusan tentang mendapatkan dana kompensasi antara “Peta Area Terdampak” yang diganti oleh pihak PT Minarak Lapindo dan daerah “Luar Peta Area Terdampak” yang akan diganti oleh pihak Pemerintah.

Masalah yang terjadi dimasyarakat

Kenyataan dan fenomena yang dialami oleh para korban Lumpur Lapindo yang tinggal di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini sangat memprihatinkan dan menyedihkan.Faktor-faktor penting yang sangat dirasakan para korban yaitu :

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusi, kebutuhan dasar juga erat kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia, untuk mendapatkan kebutuhan dasar ini maka banyak manusia melakukan upaya-upaya seperti bekerja dan berdagang.Hal ini beda dengan para korban lumpur lapindo yang ada di Pasar Baru Porong Sidoarjo, yang mana kebutuhan dasarnya

sudah ada yang menjamin pemenuhannya yaitu pihak lapindo. Walaupun demikian masih banyak juga permasalahan yang dihadapi oleh para korban untuk memenuhinya sehingga adanya upaya-upaya alternatif yang harus dilakukan oleh para korban sehingga terpenuhilah kebutuhan dasarnya. Pekerjaan yang sudah mereka jalani sampai bertahun-tahun kini telah tiada karena tempat mereka bekerja terkena (termasuk) daerah dampak lumpur lapindo sehingga mereka terpaksa harus mencari pekerjaan lain bahkan dari mereka ada yang sampai terpaksa meminta-minta supaya mendapatkan belas kasihan dari orang yang lewat di daerah tanggul tersebut. Tempat tinggal merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Tanpa rumah (tempat singgah) akan menjadi beban hidup yang sangat berat bagi mereka. Kini mereka harus mencari tempat tinggal baru seperti mencari kos atau tinggal di kerabat mereka yang dekat. Kebutuhan hidup yang semakin mahal membuat para warga kesulitan memenuhi kehidupannya terutama dalam hal Sandang Pangan. Dalam kasus ini para korban lumpur lapindo didesa ketapang berusaha memenuhi hidupnya dengan salah satunya meminta Biaya Ganti Rugi kepada Pemerintah khususnya yang bertanggung jawab dalam peristiwa bencana atau lebih tepatnya kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi pemerintah sepertinya enggan menanggapi kasus yang terjadi di daerah tersebut.

Karena antara pemerintah dan perusahaan minarak lapindo sepertinya hanya membayar ganti rugi yang sangat sedikit yaitu sekitar 20%. Padahal ada undang-undang yang dibuat tentang keputusan Presiden yaitu Perpres 48 tahun 2008 yang menjelaskan peraturan peraturan yang membahas tentang ganti rugi yaitu yang

berisi Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.” Kemudian dalam ayat (2) “Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam Peta Area Terdampak tanggal 4 Desember 2006, 20% (dua puluh per seratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.” (www.bpls.go.id)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan para korban lumpur lapindo yang ada di didesa ketapang tanggulangin sidoarjo untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan paparan dalam latar belakang diatas maksud dari penelitian ini untuk memberikan gambaran bagaimana cara bertahan hidup (Survival Strategy) masyarakat di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan serta permasalahan lain yang berhubungan dengan permasalahan hidup mereka.,

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menempatkan realitas sosial dan tingkah laku individu sebagai pokok bahasan utama. Dengan bersumber dari hakekat manusia sebagai makhluk psikis,sosial dan budaya yang mengaitkan makna dan intrpretasi dalam bersikap dan bertingkah laku yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya.

Gambaran awal dari penelitian ini bahwa Strategi Bertahan Hidup Korban Lumpur Lapindo yang ada di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kecamatan Sidoarjo termasuk dianggap sebagai realitas sosial yang ada. Dalam penelitian kualitatif ini juga memungkinkan membangun posibilitas hubungan kausal yang menghasilkan sebuah sikap yang kemudian direalisasikan melalui perilaku-perilaku. Karena itulah dunia sosial dan tingkah laku manusia,termasuk masalah yang terjadi dalam kasus Lumpur Lapindo dapat dipahami secara benar melalui penelitian yang komprehensif dan melalui pendeksripsian yang lengkap pula,dan hal tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan penelitian kualitatif deskriptif.

Metode Dekriptif

Metode Dekriptif dapat diartikan dengan sebagai prosedur pemecahan masalah-masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya.

Oleh karena itu pada tahap ini metode deksriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (Fact Finding). penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain didalam aspek-aspek yang diselidiki itu. Selanjutnya agar penggunaan metode ini dalam memecahkan masalah yang dihadapi dapat mencapai hasil guna yang tinggi, akan diketengahkan beberapa bentuknya. Ini salah satu yang sangat cocok dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui yaitu melalui dua pemilahan data. Antara data sekunder dan data primer.

1.6.2.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang nantinya akan menjadi pelengkap dari penelitian yang telah diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku, surat kabar (koran), penelitian ilmiah, penelitian skripsi terdahulu, data dari desa/kelurahan dan

kecamatan, data badan pusat statistik serta berbagai literature yang berhasil diperoleh. Data sekunder ini didapatkan dengan melalui berbagai cara yang sangat diperlukan, mulai dari mencari referensi-referensi data mengenai Lumpur Lapindo Brantas dengan berbagai permasalahannya, yang berhasil didapatkan melalui browsing internet, kemudian mencari buku yang sesuai dengan tema permasalahan atau penelitian, kemudian mencari referensi-referensi dari penelitian dan skripsi terdahulu mengenai pembahasan dengan menggunakan kata “Strategi Bertahan Hidup” dan “Lumpur Lapindo”. Metode pengumpulan data seperti ini dirasa sangat bermanfaat bagi penelitian ini karena dapat memberikan tambahan pengetahuan yang mungkin sebelumnya belum pernah didapatkan.

1.6.2.2 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan studi langsung kelapangan, dalam hal ini yaitu pergi ke Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Mendapatkannya dengan melakukan wawancara dengan memakai pedoman wawancara (interview guide) yang menjadi teknik pengumpulan data primer pertama terhadap informan yang dipilih. Kemudian melakukan wawancara mendalam serta wawancara informal. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai berbagai pihak yang dianggap mengetahui dan mempunyai pengalaman tentang apa yang terjadi pada penduduk di desa ketapang dan apa permasalahan didalamnya.

1.6.3 METODE PEMILIHAN INFORMAN

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para warga yang bertempat tinggal atau yang masih berada di Desa Ketapang Kecamatan

Tanggulangi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut menggunakan Teknik Non Probability Sampling dengan jenis Purposive Sampling, jumlah populasi sering tidak diketahui dengan pasti sehingga pengambilan jumlah sampel hanya dilakukan dengan perkiraan atau estimasi telah mencukupi untuk mewakili populasi. Sehingga dalam teknik ini ukuran sampel tidak dipersoalkan karena hanya diperkirakan secara hipotesis bahwa jumlah dianggap cukup sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian (Nawawi, Hadari 2007, 166)

Maksud dari purposive sampling ini yaitu teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan sebagaimana dalam accidental sampling. Perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan dalam tujuan penelitian. Jadi maksudnya akan mewawancarai siapa saja informan yang sekiranya dapat memenuhi kriteria tertentu untuk memenuhi syarat dalam menjelaskan masalah yang terkait dalam penelitian ini. Ukuran sampel tidak dipersoalkan sebagaimana maksud dari penelitian ini yaitu mewawancarai siapa saja yang dikira tahu mengenai permasalahan yang ada dalam judul “Strategi Bertahan Hidup Bagi Korban Lumpur Lapindo” Subyek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. (Nawawi, Hadari 2007, 167)

Subyek penelitian ini menjadi informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, seperti : (1) informan kunci (*key*), yaitu mereka yang mengetahui

dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. (2) informan tambahan hanya sebagai pendukung atas penjelasan dan jawaban dari informan key dan informan utama

1.6.4 METODE ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses penyusunan data sehingga dapat ditafsirkan. Penafsiran ini bertujuan untuk menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah untuk mencari hubungan antara beberapa konsep dan mengkomparasikan dengan teori yang ada sehingga dapat menghasilkan inferensi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif kualitatif. Analisa data dimulai dengan memasukkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber dari wawancara, hasil observasi dan sebagainya. Unit analisa data dapat meliputi individu seperti, orang tua dan anak, rumah tangga, kelompok, organisasi, lembaga sosial, bahkan masyarakat. Dalam metode penelitian ini yang diambil untuk dianalisis adalah individu. Alasannya dikarenakan individu yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan saling berbagi makna sosial.

1.6.5 METODE PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA

Untuk mendapatkan data yang valid dan jelas dalam penelitian, seorang peneliti tidak hanya melakukannya dalam waktu yang singkat, tetapi perlu proses panjang dikarenakan untuk melihat hubungan dengan latar belakang penelitiannya itu. Sementara itu, konsistensi juga sangat diperlukan karena untuk menemukan unsur-unsur yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara lebih rinci. Untuk

menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan seperti teknik triangulasi yang sangat menentukan bagaimana proses terjadinya penelitian dari hipotesis yang dibuat kemudian dibandingkan dengan pengamatan langsung dari lapangan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari bahan-bahan tertulis dilapangan maupun hasil-hasil wawancara mendalam yang dilakukan. Data tersebut berupa data sekunder (yang berasal dari sumber : browsing internet, referensi buku, karya ilmiah atau skripsi terdahulu) dan dari data primer (data dari wawancara dengan para informan). Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data serta mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono 2011, 247)

Menggunakan teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu, teknik

triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Pada penelitian ini hal yang dilakukan adalah pada masyarakat sekitar yang mengalami sendiri dan juga ikut mengetahui tentang fenomena tersebut untuk memperkuat data. (Sugiyono 2011,241)

Kemudian untuk menambah dan memperkuat data yang diperoleh, perlu juga dilakukan diskusi-diskusi kecil dari siapa saja yang dianggap mengerti tentang penelitian tersebut. Teknik semacam ini diperlukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan wacana serta yang paling penting adalah memperkuat data-data yang ada untuk kemudian akan memperkuat kevalidan dari data itu sendiri

1.6.6 INFORMAN DAN LOKASI PENELITIAN

1.6.6.1 Lokasi Penelitian

Pengambilan lokasi dan informan sangat penting sekali dilakukan dalam peneliti ini. Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi dikawasan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Karena kawasan tersebut termasuk (Peta Luar Area Terdampak) dan kawasan itu sudah sangat sedikit penduduknya karena banyak warga yang pindah dari area tersebut. Dan hal ini sangat berguna untuk mencari tahu bagaimana para korban yang masih tinggal

didaerah tersebut bertahan hidup kemudian upaya apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka

1.6.6.2 Informan

Dalam penelitian ini ,sudah dilakukan dengan beberapa informan yang berjumlah sekitar 10 informan, adapun subyeknya yaitu mereka para warga yang masih tinggal dan bertahan hidup di kawasan tersebut. Penelitian tersebut menggunakan Teknik Purposive Sampling dalam artian mewawancarai siapa saja informan yang sekiranya dapat memenuhi kriteria tertentu untuk memenuhi syarat dalam menjelaskan masalah yang terkait dalam penelitian ini.

Jadi maksud dari penelitian ini yaitu mewawancarai siapa saja yang dikira tahu mengenai permasalahan yang ada dalam judul “Strategi Bertahan Hidup Bagi Korban Lumpur Lapindo” kemudian mencari informan yang berada dalam kawasan lingkup tersebut mengetahui bagaimana keadaan sebelum dan sesudah tentang judul tersebut dan Kemudian melakukan wawancara mendalam dengan berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan secara terstruktur. Disamping itu juga telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan tambahan (tidak terstruktur) sesuai dengan perkembangan penelitian. Observasi dilakukan dengan terjun langsung kemasyarakat yang menjadi korban lumpur lapindo, guna mendapat informasi yang akurat dan valid.

1.6.6.3 Waktu Penelitian

	Kegiatan	Pelaksanaan, Bulan ke-										
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1.	Menyusun Proposal Penelitian											
2.	Turun lapangan											
3.	Analisis data											
4.	Penyusunan laporan											